



# **PENGARUH ASET, BELANJA DAERAH, TOTAL ASET DAN TOTAL BELANJA TERHADAP MATURITAS SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT**

Daniel

Anis Chariri<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

## **ABSTRACT**

This study aims to obtain empirical evidence and analyze the effect of assets, regional expenditure, total assets and total expenditure on the maturity of SPIP (government internal control system). Independent variables of assets, regional expenditure, total assets and total expenditure are projected in the financial statements assessed through the results of the West Java BPK audit 2021-2022, while the Government Internal Control System is projected in the West Java BPKP audit results 2021-2022 which are assessed through the SPIP Maturity Level.

The population in this study is the West Java regional government which has been audited by BPK and BPKP in 2021 and 2022. There are 70 research samples used in accordance with predetermined criteria. The research data analysis used descriptive statistical analysis, classical assumption test and ordinal logistic regression analysis. Data analysis was performed using multiple linear regression. The results of this research analysis show that at the first point that Asset SPI has a significant influence on SPIP maturity in districts and cities in West Java Province with a contribution of the influence given of 31.2%, meaning that the greater the value of Asset SPI will have an impact on increasing the value of SPIP maturity, then at the second point Regional Expenditure SPI has a significant influence on SPIP maturity in districts and cities in West Java Province with a contribution of the influence given of 18%, meaning that the greater the value of SPI Regional Expenditure will have an impact on increasing the value of SPIP maturity, then at the third point total Regional Expenditure does not have a significant effect on SPIP maturity in districts and cities in West Java Province, meaning that changes in the value of total Regional Expenditure will not necessarily have an impact on changes in SPIP maturity value, and finally at point 4 Total Assets do not have a significant effect on SPIP maturity in districts and cities in West Java Province.

Keywords: Assets, Regional Expenditure, Total Assets, Total Expenditure, Maturity, SPIP.

## **PENDAHULUAN**

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan tujuan utama dari laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pengelolaan keuangan negara

---

<sup>1</sup> Corresponding author

---

tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan pada instansi pemerintah telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan dilaporkan secara andal. Sistem ini dikenal dengan *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah* (SPIP) yang diselenggarakan pada lingkungan instansi pemerintah secara menyeluruh (UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk mengukur kualitas dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu tujuan dari sistem pengendalian intern pemerintah adalah tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara. Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Fokus penilaian maturitas SPIP merupakan variabel yang digunakan untuk menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Variabel tersebut merupakan sub-sub unsur SPIP di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Struktur pengaruh pengendalian internal Efektivitas pengendalian internal dapat dijelaskan secara teoritis, namun tidak mudah untuk diukur (Agbejule dan Jokipii, 2009). Clements *dkk.* (2015) menyebutkan bahwa peningkatan efektivitas pengendalian internal dapat diukur dengan menurunnya jumlah kelemahan internal yang dilaporkan. Ashbaugh Skaife *dkk.* (2007) menemukan bahwa peningkatan efektivitas pengendalian internal berhubungan dengan peningkatan kualitas laba. Zhou *dkk.* (2016) menyatakan bahwa pengendalian internal dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Setiap pengendalian internal yang telah bergerak menuju tahap kematangannya akan lebih efektif dibandingkan dengan saat pengendalian internal tersebut diperkenalkan dan diimplementasikan. Salah satu metode untuk mengukur keberhasilan atau, dalam kata lain, efektivitas dari suatu

pengendalian internal adalah maturity model. Maturity model adalah pengukuran sistematis yang dapat menggambarkan dan menjelaskan komponen-komponen dari sebuah proses yang diyakini dapat bergerak menuju *output* dan *outcome* yang lebih baik. Tingkat maturitas yang rendah mengimplikasikan rendahnya kemungkinan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan tingkat maturitas yang lebih tinggi mengimplikasikan kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi (IIA, 2013).

“Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberi Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Tahun 2015. Pada Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Terhadap temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut BPK RI memzberikan rekomendasi perbaikan bagi Kementerian Luar Negeri antara lain berkoordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan penyelesaian yang tepat terhadap permasalahan internal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Diharapkan, pimpinan Kementerian Luar Negeri segera menyusun Rencana Aksi untuk menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan BPK RI. Meskipun opini yang diperoleh saat ini belum maksimal, namun capaian pada 2015 ini akan memberi dorongan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia agar bekerja lebih baik lagi.” (BPK RI, 2016)

Pada Penelitian sebelumnya menggunakan maturitas SPIP sebagai pengukuran efektivitas pengendalian intern yang lebih komprehensif dibandingkan dengan temuan pengendalian intern. Pengukuran maturitas SPIP dilakukan secara sistematis sehingga dapat menggambarkan dan menjelaskan komponen-komponen proses pengendalian intern yang diyakini akan bergerak menuju *output* dan *outcome* yang lebih baik.

Selain itu, penelitian sebelumnya juga akan melihat bagaimana karakteristik pemerintah daerah mempengaruhi maturitas SPIP yang telah diterapkan. Karakteristik pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jumlah realisasi belanja, jumlah aset, jenis, dan jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi, yaitu menambah dan memperkuat referensi khususnya yang berkaitan dengan pengendalian intern di pemerintahan, khususnya terkait maturitas SPIP.

Selain itu, penelitian sebelumnya dapat memberikan kontribusi berupa informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan maturitas SPIP pemerintah daerah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga pemerintah sebagai regulator dapat membuat formula yang lebih teruji dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan maturitas SPIP dalam upaya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa SPIP Frekuensi pembinaan berpengaruh positif terhadap maturitas SPIP pemerintah daerah. Untuk mendukung tercapainya tujuan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang lebih besar untuk meningkatkan maturitas SPIP dengan melakukan pembinaan secara intensif. Regulator, dalam hal ini pemerintah pusat, perlu memberikan sedikit motivasi kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan maturitas SPIP, baik dalam bentuk arahan maupun peraturan.

Kelemahan dari penelitian sebelumnya dikarenakan adanya temuan pengendalian intern yang berpengaruh negatif terhadap maturitas SPIP kemungkinan disebabkan karena pemerintah daerah belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK terkait temuan tersebut. Ketika tindak lanjut atas rekomendasi BPK belum sepenuhnya selesai, maka perbaikan atas temuan pengendalian intern juga belum

sepenuhnya dilakukan. Kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa APIP pemerintah daerah belum memiliki kapabilitas yang cukup dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya APIP pemerintah daerah. APIP pemda rata-rata berada pada level 1 atau 2, yang berarti hanya dapat melakukan pengawasan dan tidak dapat mengambil inisiatif untuk pencegahan dan perbaikan.

1. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dan pengujian kembali mengenai maturitas sip yang ditentukan oleh karakteristik maturitas model dan karakteristik pemda yang bersumber pada penelitian yang dilakukan oleh (Suryato dan Dedi sinaga, 2017). Faktor karakteris maturitas model yang mempengaruhi maturitas sip pemda seperti yang telah dipaparkan antara lain pengaruh pembinaan sip, jumlah kelemahan sip, dan karakteristik pemda.

Penelitian-penelitian telah dilakukan lebih lanjut untuk mengetahui berbagai faktor yang dianggap dapat berpengaruh terhadap maturitas sip dan masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian lebih lanjut dilakukan dengan variabel penelitian yang mengacu pada penelitian (Suryato dan Dedi Sinaga, 2017).

Berdasarkan dari ringkasan yang telah dijelaskan di atas, dapat dicetuskan penelitian berjudul **“PENGARUH ASET, BELANJA DAERAH, TOTAL ASET DAN TOTAL BELANJA TERHADAP MATURITAS SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT” (Studi Empiris pada PEMDA (PEMERINTAH DAERAH) JAWA BARAT 2021-2022)**

## 1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Apakah terdapat pengaruh aset terhadap maturitas SPIP?

2. Apakah terdapat pengaruh belanja daerah terhadap maturitas SPIP?
3. Apakah terdapat pengaruh total aset terhadap maturitas SPIP?
4. Apakah terdapat pengaruh total belanja terhadap maturitas SPIP?

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS** **Teori Agensi (*Agency Theory*)**

(Jensen & Meckling, 1976) menuturkan, *agency theory* yakni sebuah gambaran hubungan yang muncul akibat dari kontrak diantara pihak *principal* pada pihak lain yang disebut *agent*. Pihak *principal* merupakan pihak yang mendelegasikan wewenang atau pekerjaan kepada *agent*. *Agent* bertugas untuk menjalankan tugas *principal* termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan. Pemahaman yang memuat tentang hubungan diantara prinsipal dengan agen disebut teori keagenan. Prinsip pokok mengenai teori tersebut yakni terdapatnya suatu keterkaitan kerja diantara pihak pemberi kewenangan (prinsipal) yakni seorang investor dimana menanamkan sahamnya di perusahaan pada pihak penerima kewenangan (agen) yakni manajer perusahaan melalui wujud kontrak kerja sama.

### **Kerangka Berpikir dan Penetapan Hipotesis**

Kerangka riset ini membantu untuk menunjukkan tautan logis antar variabel. Riset ini mempergunakan lima *prediction variable*.

*Prediction variable* dalam riset ini yaitu aset, belanja daerah, total aset, total belanja daera dan maturitas SPIP.

### **SPI Aset terhadap Maturitas SPIP**

Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPKP dengan menyusun pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, pembimbingan dan penyuluhan SPIP, serta peningkatan kompetensi APIP. Peran ini secara konseptual sesuai dengan konsep *outsourse audit internal*, yaitu peran untuk membantu dan bekerja sama dengan audit internal (*insource*) dalam menangani

beberapa masalah dalam organisasi (Carey dan Subramaniam, 2006). Pembinaan ini dimaksudkan agar SPIP di pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Semakin sering pembinaan SPIP dilakukan, maka semakin banyak kelemahan yang ditemukan dan semakin banyak perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SPIP.

**H1 : SPIP Aset memiliki pengaruh positif terhadap maturitas SPIP.**

### **SPI Belanja Daerah terhadap maturitas SPIP**

Sebagian besar penelitian mengenai efektivitas pengendalian internal menggunakan jumlah temuan pengendalian internal sebagai proksi. Clements *dkk.* (2015) menyatakan bahwa peningkatan efektivitas pengendalian internal dapat diukur melalui penurunan jumlah kelemahan internal yang dilaporkan. Zaelani dan Martani (2011) meneliti tentang efektivitas pengendalian internal pada pemerintah daerah di Indonesia dan menggunakan jumlah temuan pengendalian internal yang diperoleh dari LKPD yang telah diaudit oleh BPK sebagai proksi dari efektivitas pengendalian internal.

Dalam penyampaian temuan pengendalian intern oleh BPK kepada pemerintah daerah, disampaikan pula rekomendasi terkait temuan tersebut. Pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan pengendalian intern tersebut dengan melakukan perbaikan. Dengan kata lain, apabila rekomendasi perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, maka hal tersebut akan meningkatkan efektivitas pengendalian intern pada tahun berikutnya.

Dengan demikian, semakin banyak temuan pengendalian intern yang dilaporkan oleh BPK, maka semakin banyak pula perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan maturitas SPIP.

**H2 : SPI Belanja Daerah memiliki pengaruh positif terhadap maturitas SPIP.**

### **Total Belanja Daerah terhadap maturitas SPIP**

Organisasi yang lebih besar memiliki banyak prosedur standar dalam pelaporan keuangan mereka dan memiliki lebih banyak sumber daya manusia untuk memisahkan tugas-tugas yang terorganisir dengan baik.

Selain itu, daerah dengan ukuran yang lebih besar atau dengan total aset yang lebih besar akan memiliki permintaan yang besar dalam melaporkan pengungkapan wajib mereka kepada publik. Pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut daftar aset yang mereka miliki, pemeliharaan dan pengelolaannya (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Oleh karena itu, semakin besar ukuran pemerintah daerah yang diproyeksikan dengan total aset yang dimilikinya, maka semakin baik pula maturitas SPIP-nya.

**H3 : Total Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap maturitas SPIP.**

### **Total Aset terhadap Maturitas SPIP**

Sebagian besar penelitian mengenai efektivitas pengendalian internal menggunakan jumlah temuan pengendalian internal sebagai proksi. Clements *dkk.* (2015) menyatakan bahwa peningkatan efektivitas pengendalian internal dapat diukur melalui penurunan jumlah kelemahan internal yang dilaporkan. Zaelani dan Martani (2011) meneliti tentang efektivitas pengendalian internal pada pemerintah daerah di Indonesia dan menggunakan jumlah temuan pengendalian internal yang diperoleh dari LKPD yang telah diaudit oleh BPK sebagai proksi dari efektivitas pengendalian internal. Dalam penyampaian temuan pengendalian intern oleh BPK kepada pemerintah daerah, disampaikan pula rekomendasi terkait temuan tersebut. Pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan pengendalian intern tersebut dengan melakukan perbaikan. Dengan kata lain, apabila rekomendasi perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, maka hal tersebut akan meningkatkan efektivitas pengendalian intern pada tahun berikutnya. Dengan demikian, semakin banyak temuan pengendalian intern yang



dilaporkan oleh BPK, maka semakin banyak pula perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan maturitas SPIP.

**H4 : Total Aset berpengaruh positif terhadap Maturitas SPIP.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Independen**

Variabel independen yang diteliti pada penelitian ini Aset, Belanja, Total aset, Total belanja.

#### **Aset**

Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan manfaat bagi setiap orang atau perusahaan.

#### **Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

#### **Total Aset**

Total Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan manfaat bagi setiap orang atau perusahaan.

#### **Total Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004).

### **Variabel Dependen**

#### **Maturitas SPIP**

Maturitas SPIP dalam riset ini diprosikan dengan hasil penilaian dari karakteristik penilaian maturitas SPIP (Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia No 4 Tahun 2016). Besaran peringkat penilaian

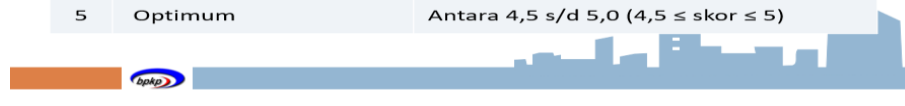
maturitas SPIP dihitung dengan rentang 1,0 hingga 5,0. Gambar 3.1 dan gambar 3.2 berisi ringkasan dari pemberian skor berikut.

**Gambar 3.1**

### Penilaian Tingkat Maturitas SPIP

C. PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP

NO	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR
0	Belum Ada	Kurang dari 1,0 ( $0 < \text{skor} < 1,0$ )
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ( $1,0 \leq \text{skor} < 2,0$ )
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ( $2,0 \leq \text{skor} < 3,0$ )
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ( $3,0 \leq \text{skor} < 4,0$ )
4	Terkelola Dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ( $4,0 \leq \text{skor} < 4,5$ )
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ( $4,5 \leq \text{skor} \leq 5$ )



**Gambar 3.2**

### Karakteristik Tingkat Maturitas SPIP

Penilaian SPI pada instansi BPK, pemeriksa menggunakan Matriks Risiko Pengendalian (*Control Risk Matriks/CRM*). CRM dilakukan untuk setiap siklus transaksi entitas yang diperiksa. Tujuan penilaian risiko pengendalian dengan menggunakan CRM ini adalah untuk menentukan area atau siklus mana yang memerlukan pengujian pengendalian (*test of control*). Siklus transaksi yang akan dilakukan pengujian pengendalian adalah siklus atau kelas-kelas transaksi yang memiliki risiko pengendalian rendah atau sedang.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam riset ini adalah hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Barat terhadap Laporan Keuangan Pemda Jawa Barat tahun 2021-2022 dan hasil penilaian maturitas SPIP oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat terhadap Pemerintah Jawa Barat pada tahun 2021-2022.

### Jenis Data dan Sumber Data

Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan berasal dari berbagai sumber, antara lain:

1. PIK (Pusat Informasi Komunikasi) BPK Perwakilan Jawa Barat untuk memperoleh Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Barat tahun 2021-2022.
2. Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Jawa Barat melalui surat pengantar oleh Kampus untuk memperoleh Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat terhadap Pemerintahan Jawa Barat pada tahun 2021-2022

### Metode Pengumpulan Data

Pemerolehan data dalam riset ini dengan mengambil data pada PIK (Pusat Informasi Komunikasi) BPK Perwakilan Jawa Barat dan data dari BPKP Perwakilan Jawa Barat. Selain itu, dalam melakukan riset ini diperlukan pemahaman terhadap berbagai bentuk literatur yang terdiri dari jurnal, *literature review*, dan sumber-sumber lain yang mendukung dan berhubungan dengan riset ini.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam riset ini adalah analisis regresi berganda yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Tujuan dilakukannya analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui arah hubungan masing-masing *prediction variable*, apakah berhubungan positif atau negatif dengan *criterion variable*. Selanjutnya juga digunakan untuk memprediksi nilai *criterion variable* apakah nilai *prediction variable* mengalami penurunan atau peningkatan. Menurut apa yang dikatakan oleh (Ghozali, 2018), model regresi riset ini disesuaikan dengan adanya *prediction variable* dan dependen sebagai berikut.

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 X_{4t} + \beta_5 X_{5t} + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Kinerja Perusahaan

T : Tahun

A : Konstanta

E : Error

$\beta_{1-5}$  : Koefisien Regresi

X1 : Aset

X2 : Belanja Daerah

X3 : Total Aset

X4 : Total Belanja Daerah

X5 : Maturitas SPIP

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi dan Objek Penelitian

Populasi yang menjadi objek dalam riset ini yaitu pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Sebagai sampel awal pada pemerintah daerah pada tahun 2021-2022 diperoleh sebanyak 56 kabupaten atau kota dan 2 provinsi. Sampel dipilih dan ditentukan dengan *purposive sampling*, didasarkan pada ketersediaan serta kecukupan data yang memenuhi kriteria. Identifikasi sampel tercantum dalam tabel 4.1 di bawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Populasi dan Sampel**

Keterangan	Jumlah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (kabupaten dan kota) 2021-2022	56
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (kabupaten dan kota) 2021-2022 yang tidak dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP	0
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (kabupaten dan kota) 2021-2022 yang tidak memiliki kelengkapan data	0
<b>Total sampel Pemda untuk tahun 2021-2022</b>	<b>56</b>

Sumber: *Data sekunder, diolah tahun 2023*

### 4.1 Analisis Data

#### 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Temuan uji analisis statistik deskriptif deskriptif spi aset, spi belanja daerah, total belanja daerah, total aset, dan maturitas spip pada 56 data observasi ditampilkan melalui tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPI Aset	56	0,00	8,00	3,1964	1,48225
SPI Belanja Daerah	56	0,00	5,00	1,8036	1,11876
Total Belanja Daerah	56	685.321.284.913	37.470.910.437.064	4.485.722.109.256	6206544525429
Total Aset	56	27.721.903.811	46.024.442.498.224	9.182.395.100.320	11.078.836.630.613
Maturitas SPIP	56	2,30	3,33	2,9566	0,21155

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS 25.0 dan data sekunder 2023

Melalui tabel pengujian statistik deskriptif diketahui bahwa variabel SPI aset yang diproyeksikan melalui perhitungan Regresi berganda memiliki nilai terendah 0,00 dan tertinggi 8,00. Acuan dalam riset ini yaitu Penilaian skor maturitas dengan nilai indikator rentang waktu dari 1-5, secara teoritis memiliki skor tertinggi 5,00 terendah 1,00. Berdasarkan *output* pada tabel 4.2 rata-rata yang diperoleh sebesar 3,1964 dan standar deviasi sebesar 1,48225. Secara teoritis dapat diartikan pemerintah daerah sampel masih belum melakukan pengungkapan secara maksimal sesuai dengan penilaian skor maturitas karena rata-rata perusahaan sampel belum mencapai median dari skor keseluruhan indikator. Pada variabel maturitas SPIP yang diproyeksikan melalui indikator BPKP mempunyai nilai terendah 2,30 dan tertinggi 3,33. Sampel riset dengan nilai terendah bernilai ( $<1,00$ ) mencerminkan pemerintah daerah kurang baik dan di bawah standar yang sudah ditetapkan. Nilai rata-rata maturitas SPIP perusahaan sebesar 2,9566. Angka tersebut mencerminkan tingginya aset perusahaan sampel dari nilai pasar sebab rata-rata bernilai ( $>1,00$ ).sss

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. SPI Aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap maturitas SPIP pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 31,2%, artinya semakin besar nilai SPI Aset akan berdampak terhadap peningkatan nilai maturitas SPIP, sebaliknya SPI Aset yang rendah dapat mengakibatkan penurunan maturitas SPIP.
2. SPI Belanja Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap maturitas SPIP pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dengan kontribusi pengaruh yang

diberikan sebesar 18%, artinya semakin besar nilai SPI Belanja Daerah akan berdampak terhadap peningkatan nilai maturitas SPIP, sebaliknya SPI Belanja Daerah yang rendah dapat mengakibatkan penurunan maturitas SPIP.

3. Total Belanja Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap maturitas SPIP pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, artinya perubahan nilai Total Belanja Daerah belum tentu akan berdampak terhadap perubahan nilai maturitas SPIP.
4. Total Aset tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap maturitas SPIP pada kabupaten dan kotssa di Provinsi Jawa Barat, artinya perubahan nilai Total Aset belum tentu akan berdampak terhadap perubahan nilai maturitas SPIP.

## REFERENSI

- Agbejule, A. dan A. Jokippi. 2009. Strategi, aktivitas pengendalian, pemantauan dan efektivitas. *Managerial Auditing Journal*, 24 (6), 500-522.
- Andersen, E. S. dan S. A. Jessen. 2003. Kematangan proyek dalam organisasi. *Jurnal internasional manajemen proyek*, 21 (6), 457- 461.
- Ashbaugh-Skaife, H., W. Daniel dan R. K. William. 2007. Penemuan dan pelaporan kekurangan pengendalian internal sebelum audit yang diamanatkan SOX. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 44 (1), 166- 192.
- BPK. 2004. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- BPKP. 2016. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.  
(BPK RI, 2016)
- Clements, C., D. N. John dan W. Paul. 2015. Rangkap jabatan direksi, keterkaitan industri, dan efektivitas tata kelola perusahaan. *Corporate Governance*, 15 (5), 590-606.
- Einsenhardt, 1989
- Institut Auditor Internal. 2013. Memilih, menggunakan, dan membuat model kematangan: alat untuk perikatan asurans dan konsultasi.

Halim, A. dan S. Abdullah. 2006. Hubungan dan Maslah Keagenan di pemerintah daerah: (sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 (1), 53-64.

Jensen, J. M. dan W. H. Meckling. 1976. Teori perusahaan: Perilaku manajerial, biaya keagenan dan struktur kepemilikan. *Jurnal Ekonomi Keuangan*, 3 (4), 305-360

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sutaryo dan Sinaga, Dedi. 2018. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Peran Pembinaan Internal dan Pengendalian Eksternal Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 19 No. 1, Hlm: 24-35.

Zhou, H., C. Hanwen dan C. Zhirong. 2016. Pengendalian internal, siklus hidup perusahaan, dan kinerja perusahaan. Dalam *The Political Economy of Chinese Finance*, 12 (3), 189- 209.